

# LPPD 2023

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



## KECAMATAN BINUANG

KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Binuang Tahun 2023 ini dapat diselesaikan penyusunannya. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebagai sub sistem Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2023, maka Pemerintahan Kecamatan Binuang mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Dimana secara konstitusional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 ini juga dimaksudkan sebagai sebuah wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat Kecamatan Binuang. Dengan dukungan segenap pihak yang telah berkenan untuk membantu dengan memberikan data dan masukannya, maka pembuatan laporan ini dapat diselesaikan. Untuk itu, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian laporan ini.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Binuang Tahun 2023 ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan bahan untuk. penilaian dan evaluasi yang berguna bagi perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Binuang di masa yang akan datang dengan harapan semoga kemajuan dan kemakmuran Kecamatan Binuang tercinta dapat terus berjalan dan tercipta dengan baik.

Binuang, 19 Januari 2024

Camat Binuang,



H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM  
NIP. 19860101 201101 1 015

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	1
a. Dasar Pembentukan SKPD.....	1
b. Struktur ASN di SKPD .....	6
c. Realisasi Anggaran dan Belanja SKPD.....	9
1.1.2. Perencanaan Pembangunan.....	14
a. Permasalahan Strategis SKPD .....	14
b. Visi dan Misi SKPD.....	15
c. Program Pembangunan Daerah .....	17
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Renja.....	25
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	38
BAB II CAPAIAN KINERJA SKPD.....	41
2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	41
2.1.1. Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	41
a. Urusan Fungsi Penunjang.....	41
b. Indikator Kinerja Kunci .....	42
c. Capaian Kinerja Tahun N .....	45
d. Sumber Data .....	45
2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan .....	46
2.2.1. Target Dalam Perjanjian Kinerja .....	47
2.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja .....	48
2.2.3. Pengukuran Kinerja Tahun Sebelumnya.....	50
2.2.4. Pengukuran Kinerja dibandingkan dengan Renstra .....	51

2.2.5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya .....	53
2.2.6. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target	58
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
3.1. Kesimpulan .....	60
3.2. Saran-Saran .....	61

Lampiran-Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.1.1. Penjelasan Umum**

###### **a. Dasar Pembentukan SKPD Kecamatan Binuang**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan Binuang Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan maksud sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan hukum ditetapkannya Kabupaten Tapin sebagai daerah otonom sebagaimana uraian di atas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong. Berdasarkan undang-undang inilah maka pada tanggal 30 Nopember 1965 Kabupaten Tapin memisahkan diri dari wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjadikan Kota Rantau sebagai ibukota kabupaten. Dengan terbentuknya Kabupaten Tapin, yang salah satunya yaitu Kecamatan Binuang merupakan kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapin yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965.

Kantor Kecamatan Binuang adalah merupakan salah satu struktur dan tata kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dibentuk berdasarkan *Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin* yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sehingga dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan Binuang Tahun Anggaran 2023 ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, diantaranya adalah:

1. Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Mengenai Kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023.

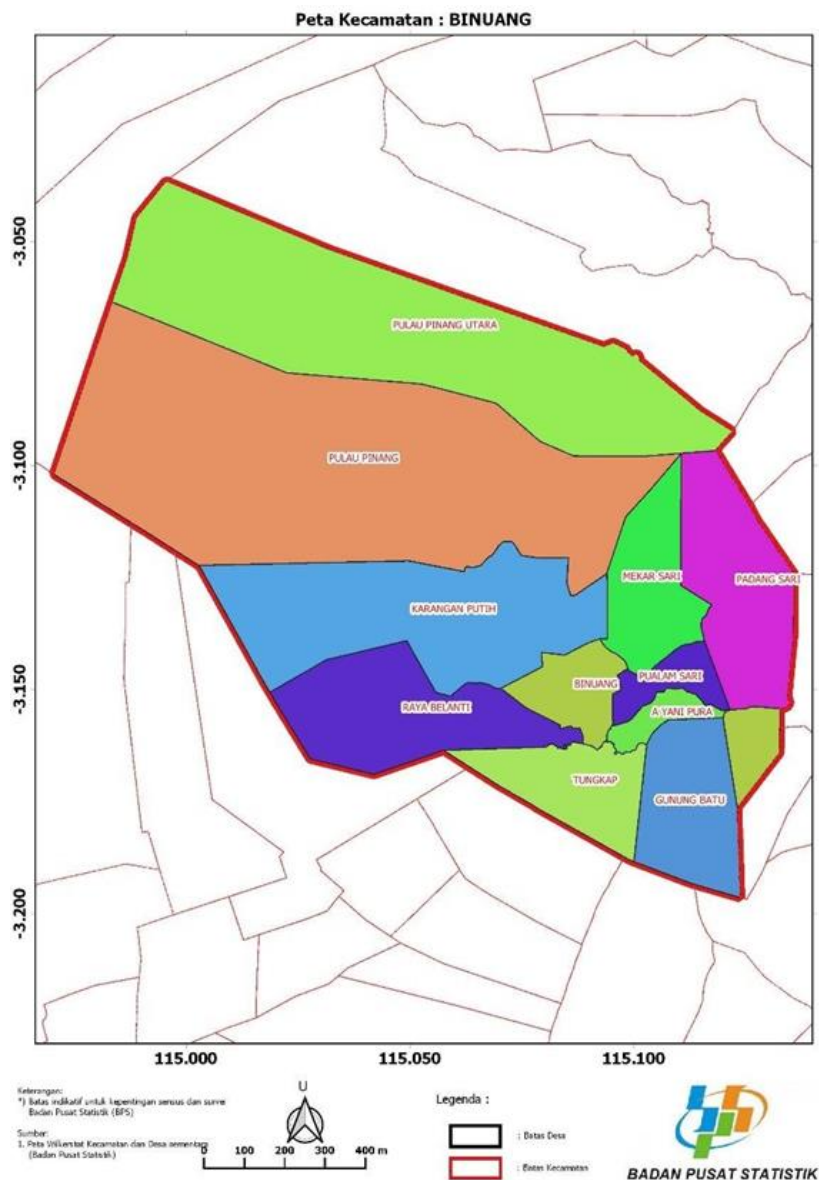
### **Kondisi Geografis Daerah**

Kecamatan Binuang adalah salah satu Kecamatan dari 12 Kecamatan yang



ada di Kabupaten Tapin, dengan luas wilayah  $\pm 218,10 \text{ Km}^2$  dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Tapin (Rantau) sejauh  $\pm 28 \text{ Km}$ . dan  $\pm 85 \text{ Km}$  dari Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin).

Kecamatan Benuang berada pada ketinggian 300 sampai dengan 500 Meter di atas permukaan laut dan terletak antara  $2032'43'' - 3000'43''$  Lintang Selatan dan  $114046'13'' - 115030'33''$  Bujur Timur.



**Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatan Benuang**

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Binuang sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tapin Selatan  
Sebelah Selatan : Kabupaten Banjar  
Sebelah Barat : Kecamatan Tapin Tengah dan Kabupaten Banjar  
Sebelah Timur : Kecamatan Hatungun.

Luas wilayah Kecamatan Binuang adalah berupa daratan seluas 196,83 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 3 Kelurahan dan 8 Desa dengan rincian luas sebagaimana pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Luas Kelurahan dan Desa di Kecamatan Binuang**

No	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Binuang	6,07
2	Karangan Putih	24,00
3	Raya Belanti	12,67
4	Tungkap	8,54
5	A Yani Pura	1,97
6	Gunung Batu	10,70
7	Padang Sari	12,34
8	Pualam Sari	2,81
9	Pulau Pinang	61,50
10	Pulau Pinang Utara	48,17
11	Mekar Sari	8,06
Total Luas Wilayah		196,83

Sumber: Kecamatan Binuang Dalam Angka 2023 diakses dari <https://tapinkab.bps.go.id>

### **Gambaran Umum Demografis**

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, penduduk Kecamatan

Binuang adalah 32.282 jiwa, yang terdiri dari 16.002 jiwa penduduk laki-laki dan 16.280 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya, penduduk Kecamatan Binuang berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing kelurahan/desa dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Penduduk Kecamatan Binuang Menurut Jenis Kelamin**

No	Kelurahan / Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Binuang	3.347	3.508	6.855
2	Karangan Putih	1.920	1.927	3.847
3	Raya Belanti	2.222	2.220	4.442
4	Tungkap	1.976	2.049	4.025
5	A Yani Pura	1.251	1.278	2.529
6	Gunung Batu	686	704	1.390
7	Padang Sari	328	347	675
8	Pualam Sari	1.128	1.126	2.254
9	Pulau Pinang	1.202	1.217	2.419
10	Pulau Pinang Utara	1.347	1.368	2.715
11	Mekar Sari	595	536	1.131
<b>Jumlah</b>		<b>16.002</b>	<b>16.280</b>	<b>32.282</b>

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

**b. Struktur Jumlah ASN di SKPD, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di SKPD Kecamatan Binuang Tahun 2023 sebanyak 25 orang dengan rincian: 11 ASN di Kecamatan Binuang, 4 ASN di Kelurahan Raya Belanti, 5 ASN di Kelurahan Binuang, dan 5 ASN di Kelurahan Karang Putih sebagaimana pada Tabel 1.3.

Dari tabel tersebut kualifikasi pendidikan tertinggi ialah Strata II sebanyak 8 orang, diikuti Strata I sebanyak 8 orang, Diploma III sebanyak 6 orang, Diploma II sebanyak 1 orang dan SLTA/Sederajat sebanyak 2 orang.

Pangkat dan golongan tertinggi ialah Pembina / IV a sebanyak 3 orang, diikuti Penata Tk. I / III d sebanyak 7 orang, Penata / III c sebanyak 4 orang, Penata Muda Tk. I / III b sebanyak 4 orang, Penata Muda / III a sebanyak 1 orang, Pengatur Tk. I / II d sebanyak 1 orang, dan Pengatur / II c sebanyak 5 orang.

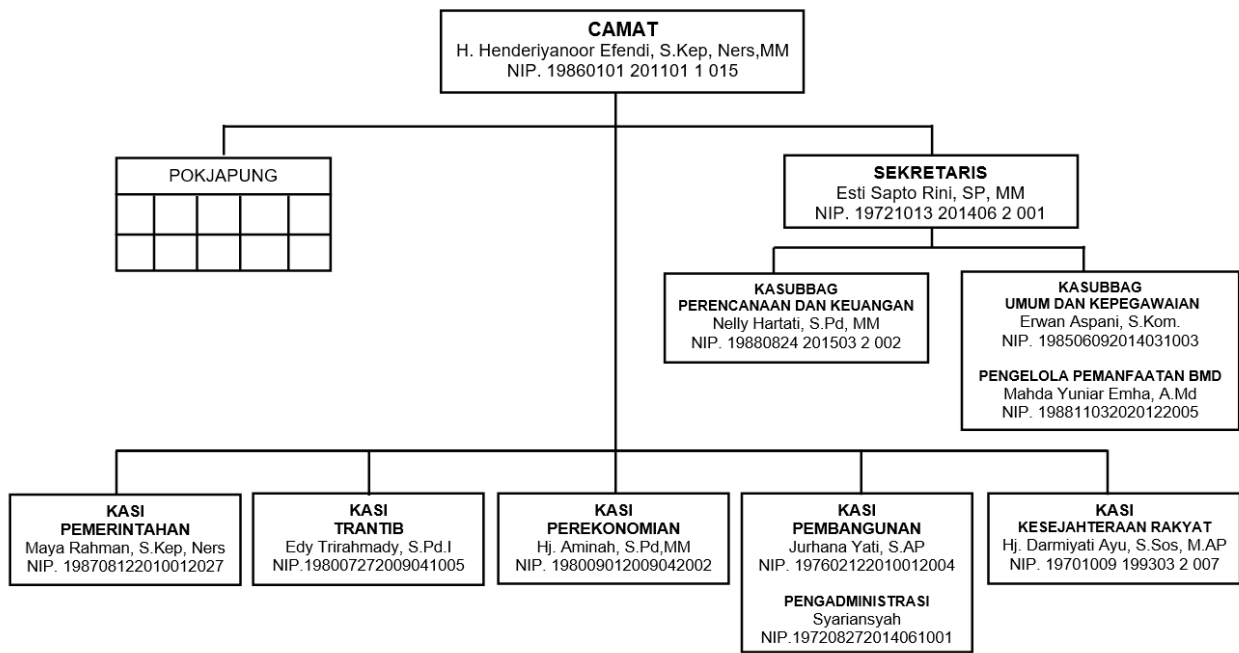
Adapun jumlah pejabat struktural sebanyak 19 orang dan pejabat fungsional umum sebanyak 6 orang. Pejabat struktural terdiri dari eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV a sebanyak 7 orang, dan eselon IV b sebanyak 10 orang.

**Tabel 1.3**  
**Data ASN Kecamatan Binuang Tahun 2023**

No	Nama / NIP	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat dan Golongan	Jabatan	Keterangan
<b>KECAMATAN BINUANG</b>					
1	H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep, Ners, MM NIP. 198601012011011015	Strata II	Penata Tk. I / III d	Camat	Struktural / Eselon III a
2	Esti Sapto Rini, SP, MM NIP.197210132014062001	Strata II	Penata / III c	Sekretaris Camat	Struktural / Eselon III b
3	Hj. Darmiyati Ayu, S.Sos, M.AP NIP.197010091993032007	Strata II	Pembina / IV a	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Struktural / Eselon IV a
4	Edy Trirahmady, S.Pd.I NIP.198007272009041005	Strata I	Penata Tk. I / III d	Kasi Trantib	Struktural / Eselon IV a
5	Maya Rahman, S.Kep,Ners NIP.198708122010012027	Strata I	Penata Tk. I / III d	Kasi Pemerintahan	Struktural / Eselon IV a
6	Hj. Aminah, S.Pd,MM NIP.198009012009042002	Strata II	Penata / III c	Kasi Perekonomian	Struktural / Eselon IV a
7	Jurhana Yati, S.AP NIP.197602122010012004	Strata I	Penata Muda Tk. I / III b	Kasi Pembangunan	Struktural / Eselon IV a
8	Nelly Hartati, S.Pd,MM NIP.198808242015032002	Strata II	Penata / III c	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Struktural / Eselon IV b

9	Erwan Aspani, S.Kom NIP.198506092014031003	Strata I	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Struktural / Eselon IV b
10	Mahda Yuniar Emha, A.Md NIP.198811032020122005	Diploma III	Pengatur / II c	Pengelola Program dan Kegiatan	Fungsional Umum
11	Syariansyah NIP.197208272014061001	SLTA / Sederajat	Pengatur / II c	Pengadministrasi Umum	Fungsional Umum
<b>KELURAHAN RAYA BELANTI</b>					
1	Jaidi, A.Md.Kes NIP.196610151988121002	Diploma III	Penata Tk. I / III d	Lurah	Struktural / Eselon IV a
2	Chairun Nisa, SE NIP.198303262011012008	Strata I	Penata Tk. I / III d	Sekretaris Lurah	Struktural / Eselon IV b
3	Anjar Pratama, S.Kep,Ners, MM NIP.198807092010011004	Strata II	Penata / III c	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Struktural / Eselon IV b
4	Andri Perdana, A.Md NIP.198912242011011003	Diploma III	Penata Muda Tk. I / III b	Kasi Pemerintahan	Struktural / Eselon IV b
<b>KELURAHAN BINUANG</b>					
1	Hj. Umie Amelea Artha, SKM,MM NIP. 197108081992032007	Strata II	Pembina /IV a	Lurah	Struktural / Eselon IV a
2	Purnama Yanti, S.AP,MM NIP. 198305272012122003	Strata II	Penata Muda Tk. I / III b	Sekretaris Lurah	Struktural / Eselon IV b
3	Rahmatullah Faisal, S.Kom NIP. 198112012009041002	Strata I	Penata Tk. I / III d	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Struktural / Eselon IV b
4	Aneta Fahriana, SE NIP. 197812082006042018	Strata I	Penata Tk. I / III d	Kasi Pemerintahan	Struktural / Eselon IV b
5	Arpah, A.Md NIP. 199608172020122012	Diploma III	Pengatur / II c	Pengelola Program dan Kegiatan	Fungsional Umum
<b>KELURAHAN KARANGAN PUTIH</b>					
1	Duana, A.Ma.Pd NIP.196512111986081002	Diploma II	Pembina / IV a	Plt. Lurah	Fungsional Umum
2	Herru Sutarmiyah, S.AP NIP. 197504292012122001	Strata I	Penata Muda Tk. I / III b	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Struktural / Eselon IV b
3	Roesby Elmathin, A.Md NIP.198909272011011004	Diploma III	Penata Muda / III a	Pengadministrasi Umum / Plt Kasi Pemerintahan	Fungsional Umum
4	Ridha Rahmawati, A.Md NIP. 199107092020122006	Diploma III	Pengatur / II c	Pengelola Program dan Kegiatan	Struktural / Eselon IV b
5	Bambang Ariyanto NIP.197212101997031007	SLTA / Sederajat	Pengatur Tk. I / II d	Pengadministrasi Umum	Fungsional Umum

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Binuang Tahun 2023



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Binuang**

Adapun struktur organisasi SKPD Kecamatan Binuang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar 1.1.

**c. Realisasi Anggaran dan Belanja SKPD.**

Penetapan indikator kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota

organisasi.

Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerjanya. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pada awal Tahun Anggaran 2023, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Binuang telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kecamatan Binuang yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kecamatan Binuang, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Binuang, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) memuat semua anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Non Program dan Non Kegiatan). Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara garis besar, capaian kinerja keuangan pelaksanaan program dan kegiatan serta non program dan non kegiatan pada Kantor

Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dapat digambarkan dalam Rekapitulasi Plafon Anggaran dan Realisasi Tahun 2023 pada Tabel 1.4. Dari tabel tersebut terlihat bahwa Anggaran SKPD Kecamatan Binuang Tahun 2023 terdiri dari Belanja Pegawai/Non Kegiatan, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal dengan total 8.480.605.477. Anggaran tersebut terealisasi sebesar total 7.969.025.016 atau 93,97%.

**Tabel 1.4**  
**Rekapitulasi Realisasi Anggaran SKPD Kecamatan Binuang**  
**Tahun 2023**

No	Uraian	Tahun 2023		
		1 Januari s.d. 31 Desember 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai/ Non Kegiatan	3.426.142.329	3.214.427.369	93,82
2	Belanja Barang dan Jasa	3.518.932.708	3.263.251.205	92,73
3	Belanja Modal	1.535.530.440	1.491.346.442	97,12
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.480.605.477</b>	<b>7.969.025.016</b>	<b>93,97</b>

*Sumber : FMIS Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023*

Untuk Realisasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dijabarkan pada Tabel 1.5 berikut.

**Tabel 1.5**  
**Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Persentase**  
**SKPD Kecamatan Binuang Tahun 2023**

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	5.916.636.819	5.517.603.510	93,26
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.008.000	6.008.000	100
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.008.000	6.008.000	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.430.940.729	3.219.225.569	93,83



1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.426.142.329	3.214.427.369	93,82
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.399.200	2.399.100	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.399.100	2.399.100	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	944.623.284	926.549.647	98,09
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.532.966	65.203.000	99,50
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.681.243	36.499.680	99,51
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.571.506	87.014.840	95,02
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.809.413	21.709.254	99,54
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	729.028.156	716.122.873	98,23
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	922.241.734	810.277.692	87,86
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	476.013.806	469.420.704	98,61
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	446.227.928	340.856.988	76,39
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.231.456	332.441.450	99,76
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.045.456	6.040.000	99,91
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.777.040	50.770.090	99,99
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.408.960	275.631.360	99,72
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.591.616	223.101.152	79,82
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	69.655.616	68.851.152	98,85
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.936.000	154.250.000	73,47
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>36.226.000</b>	<b>36.225.900</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<b>36.226.000</b>	<b>36.225.900</b>	100
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tapin Tengah)	<b>36.226.000</b>	<b>36.225.900</b>	100
<b>III</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>2.242.219.632</b>	<b>2.138.710.488</b>	<b>95,38</b>
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	216.471.642	216.439.848	99,99
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.417.500	4.417.300	99,99

2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	212.054.142	212.022.548	99,99
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.025.747.990	1.922.270.640	94,89
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	700.500.966	695.072.750	99,23
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.325.247.024	1.227.197.890	92,60
<b>IV</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>130.458.434</b>	<b>130.455.320</b>	<b>100</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	130.458.434	130.455.320	100
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	128.249.684	128.246.670	100
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.208.750	2.208.650	100
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>117.474.398</b>	<b>117.469.148</b>	<b>100</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	117.474.398	117.469.148	100
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	117.474.398	117.469.148	100
<b>VI</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>37.590.194</b>	<b>28.560.650</b>	<b>75,98</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.590.194	28.560.650	75,98
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.208.750	2.208.750	100
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.835.000	8.832.050	99,97
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa	2.208.750	2.205.900	99,87
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.208.750	2.208.750	100
5	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.128.944	13.105.200	59,22
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.480.605.477</b>	<b>7.969.025.016</b>	<b>93,97</b>

Sumber : FMIS Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan program dengan realisasi

anggaran tertinggi yakni 100 % ialah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

## **1.1.2 Perencanaan Pembangunan**

### **a. Permasalahan Strategis SKPD Kecamatan Binuang**

Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Binuang Tahun Anggaran 2023 tidak ditemukan kendala dan hambatan yang berarti. Walaupun ada kendala atau hambatan yang dihadapi tetapi hal tersebut tidak berpengaruh besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD Kecamatan Binuang. Permasalahan strategis yang dihadapi serta solusi atau kebijakan yang diambil oleh SKPD Kecamatan Binuang dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya SDM aparatur Kecamatan Binuang baik dari segi kuantitas maupun kualitas di bidang teknis maupun teknologi informasi. Permasalahan ini diatasi dengan penambahan aparatur yang memiliki kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis. Disamping itu pemberian kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi melalui izin belajar, bimbingan teknis, dan diklat struktural/ fungsional sesuai dengan bidangnya. Mekanisme reward dan punishment juga diterapkan guna meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun perekonomian kelurahan/desa. Solusi permasalahan ini ialah dengan

mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung kemandirian ekonomi desa.

3. Kurangnya tanggapan dari pemangku kepentingan/stakeholder terhadap usulan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini Kecamatan Binuang memotivasi para tokoh masyarakat mengajukan usulan serta pelaksanaan Pembangunan dengan pendekatan partisipasi aktif masyarakat.

#### **b. Visi dan Misi SKPD Kecamatan Binuang**

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Kecamatan Binuang harus searah dan sinkron dengan visi dan misi Bupati Tapin sehingga dalam proses pelaksanaannya semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

**“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun

2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

### Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<b>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</b>	<b>Bersama</b>	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai ujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
	<b>Mewujudkan</b>	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang Diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	<b>Maju</b>	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	<b>Sejahtera</b>	Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	<b>Agamis</b>	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas,

berbudaya dan berdaya saing.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

**c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.**

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin 2018-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Binuang dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikatif dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan

kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Binuang dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 1.6

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
	2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
			target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-6		-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75		77		79		81		83		85		85		Kabupaten	
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	78,11	80	85		86		87		88		89		89		Kecamatan	
Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B	100	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan	
Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan	
Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)			100	342.973.201	100	366.399.101	100	476.598.996	100	518.914.289	100	475.373.035	100	2.180.258.622	Kecamatan	
Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)			12	10.973.201	12	11.663.701	12	14.660.556	12	16.125.005	12	17.696.398	60	71.118.861		



waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)			12	10.600.000	12	11.204.200	12	15.405.000	12	16.945.500	12	17.445.040	60	71.599.740		
Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)			12	8.000.000	12	10.456.000	12	12.547.200	12	13.801.920	12	14.147.200	60	58.952.320		
waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)			12	1.000.000	12	1.057.000	12	1.268.400	12	1.395.240	12	1.268.400	60	5.989.040		
waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)			12	15.000.000	12	15.855.000	12	19.026.000	12	20.928.600	12	20.681.000	60	91.490.600		
Waktu Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi (bulan)			12	60.000.000	12	63.420.000	12	78.000.000	12	85.800.000	12	90.000.000	60	377.220.000		
Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (org/bulan)			12	12.000.000	12	12.684.000	12	15.220.800	12	16.742.880	12	15.220.800	60	71.868.480		
waktu penyediaan administrasi kelurahan (kelurahan/)			36	149.100.000	36	162.398.700	36	230.878.440	36	253.966.284	36	212.878.440	180	1.009.221.864		
waktu penyediaan jasa pelayanan dan perekaman E-KTP (org/bulan)			24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	24	24.000.000	24	24.000.000	120	102.000.000		
Waktu pemeliharaan kebersihan lingkungan (bulan)			12	46.800.000	12	47.500.000	12	57.000.000	12	53.157.000	12	47.449.157	60	251.906.157		
waktu penyediaan jasa surat menyurat (bulan)			12	1.000.000	12	1.057.000	12	1.268.400	12	1.395.240	12	1.268.400	60	5.989.040		
waktu penyediaan instalasi listrik & komponen penerangan bangunan kantor (bulan)			12	500.000	12	528.500	12	634.200	12	697.620	12	634.200	60	2.994.520		
Jumlah Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional (kegiatan)			1	10.000.000	1	10.575.000	1	12.690.000	1	13.959.000	1	12.684.000	5	59.908.000		
<b>Persentase Sarana &amp; Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>69</b>	<b>89,5</b>	<b>80</b>	<b>96.290.383</b>	<b>80</b>	<b>105.407.835</b>	<b>80</b>	<b>137.866.043</b>	<b>80</b>	<b>139.217.336</b>	<b>80</b>	<b>158.105.439</b>	<b>80</b>	<b>636.887.036</b>	<b>Keca</b>	<b>mata</b>

waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional (bulan)			12	19.715.300	12	20.907.835	12	27.866.043	12	28.217.336	12	38.105.439	60	134.811.953		
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (paket/unit)			4	43.500.000	116	10.500.000	15	80.000.000	10	86.000.000	10	85.000.000	155	305.000.000		
Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			12	2.000.000	12	2.500.000	12	3.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60	17.500.000		
jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia (paket/unit)			1	5.000.000	3	60.000.000	2	13.000.000	2	10.000.000	3	15.000.000	11	103.000.000		
Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor (bulan)			12	26.075.083	12	11.500.000	12	14.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	60	76.575.083		
<b>Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (%)</b>			<b>100</b>	<b>2.222.258.089</b>	<b>100</b>	<b>2.318.370.994</b>	<b>100</b>	<b>2.435.789.543</b>	<b>100</b>	<b>2.559.829.021</b>	<b>100</b>	<b>2.675.820.471</b>	<b>100</b>	<b>12.212.068.118</b>	<b>Kelu</b>	<b>raha</b>
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang (paket)			3	370.376.348	3	386.395.166	3	405.964.924	3	426.638.170	3	445.970.079	15	2.035.344.686		
Waktu Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang(bulan)			12	148.150.539	12	154.558.066	12	162.385.970	12	170.655.268	12	178.388.031	60	814.137.875		
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang(unit)			3	222.225.809	3	231.837.099	3	243.578.954	3	255.982.902	3	267.582.047	15	1.221.206.812		

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Putih (paket)			3	370.376.348	3	386.395.166	3	405.964.924	3	426.638.170	3	445.970.079	15	2.035.344.686		
Waktu Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Putih (bulan)			12	148.150.539	12	154.558.066	12	162.385.970	12	170.655.268	12	178.388.031	60	814.137.875		
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang (unit)			3	222.225.809	3	231.837.099	3	243.578.954	3	255.982.902	3	267.582.047	15	1.221.206.812		
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti (paket)			3	370.376.348	3	386.395.166	3	405.964.924	3	426.638.170	3	445.970.079	15	2.035.344.686		
Waktu Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti (bulan)			12	148.150.539	12	154.558.066	12	162.385.970	12	170.655.268	12	178.388.031	60	814.137.875		
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti (unit)			3	222.225.809	3	231.837.099	3	243.578.954	3	255.982.902	3	267.582.047	15	1.221.206.812		
<b>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>7.300.000</b>	<b>100</b>	<b>8.030.000</b>	<b>100</b>	<b>10.500.000</b>	<b>100</b>	<b>13.061.000</b>	<b>100</b>	<b>13.367.000</b>	<b>100</b>	<b>52.258.000</b>		
Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)			13	5.300.000	13	5.530.000	13	7.500.000	13	9.061.000	13	9.367.000	65	36.758.000		

Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD (laporan)			2	2.000.000	2	2.500.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	10	15.500.000		
<b>Persentase desa dengan administrasi yang baik</b>			<b>100</b>	<b>62.752.280</b>	<b>100</b>	<b>66.967.492</b>	<b>100</b>	<b>64.125.511</b>	<b>100</b>	<b>72.140.416</b>	<b>100</b>	<b>71.491.725</b>	<b>100</b>	<b>337.477.424</b>	Kecamatan	
Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat (kegiatan)			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.500.000	5	27.500.000		
jumlah koordinasi aparat pemerintahan desa (desa/kegiatan)			9	18.000.000	9	19.500.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	45	97.500.000		
waktu koordinasi pengawasan dana desa (bulan)			12	22.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	60	116.000.000		
Waktu Penyediaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan (bulan)			12	17.752.280	12	19.467.492	12	16.125.511	12	22.140.416	12	20.991.725	60	96.477.424		
<b>Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan</b>			<b>100</b>	<b>10.500.000</b>	<b>100</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100</b>	<b>58.500.000</b>	Kecamatan	
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan			1	10.500.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	12.500.000	1	12.500.000	5	58.500.000		
<b>Tingkat Pengangguran terbuka (%)</b>	<b>4,39</b>		<b>4,00</b>		<b>3,80</b>		<b>3,60</b>		<b>3,40</b>		<b>3,20</b>		<b>3,20</b>			
<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan</b>			<b>75</b>	<b>33.804.408</b>	<b>76</b>	<b>35.348.150</b>	<b>77</b>	<b>41.292.363</b>	<b>78</b>	<b>44.080.765</b>	<b>80</b>	<b>47.142.348</b>	<b>80</b>	<b>201.668.034</b>	kecamatan	
<b>Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan</b>			<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>			

jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan (kegiatan)			1	8.804.408	1	10.348.150	1	11.292.363	1	12.080.765	1	12.142.348	5	54.668.034		
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa (kegiatan)			1	10.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	5	59.000.000		
Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan keagamaan (kegiatan)			1	15.000.000	1	15.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	88.000.000		
<b>Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan (%)</b>			<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>330.000.000</b>	<b>100</b>	<b>345.000.000</b>	<b>100</b>	<b>360.000.000</b>	<b>100</b>	<b>390.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.725.000.000</b>	<b>Kelu</b>	<b>raha</b>
waktu penyediaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan dan Keluarga Kelurahan Binuang			12	100.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	60	575.000.000		
waktu penyediaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan dan Keluarga Kelurahan Karanganyar Putih			12	100.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	60	575.000.000		
waktu penyediaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan dan Keluarga Kelurahan Raya Belanti			12	100.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	60	575.000.000		
				<b>3.075.878.361</b>		<b>3.241.523.572</b>		<b>3.523.172.456</b>		<b>3.719.742.827</b>		<b>3.843.800.018</b>		<b>17.404.117.234</b>		

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.**

Program pada Kantor Kecamatan Binuang merupakan program yang ada di RPJMD Kabupaten Tapin. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kantor Kecamatan Binuang kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut dalam bentuk *Dokumen Perencanaan Tahunan*. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Binuang. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Binuang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.7**  
**Dokumen Perencanaan Tahunan**  
**Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Kecamatan Binuang TAHUN 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sa sa ra n D ae ra h	Sa sar an Pe ran gk at Da era h	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2024		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APB D Prov	A P B N	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
	Kecamatan Binuang						8.480.605.477	0	0		7.294.140.185	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang											
4	1											
4	1	1										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA											
						Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binuang	89 point	5.916.636.819	0	0		4.273.779.732
						Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%					

							Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%						
4	1	1	6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah					6.008.000			12 Bulan	6.008.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		BINUANG	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	6.008.000	0	0	12 bulan	6.008.000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.430.940.729				3.430.939.915	
4	1	1	7	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		BINUANG	Waktu Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.426.142.329	0	0	12 bulan	3.426.141.515	
4	1	1	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		BINUANG	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	2.339.200	0	0	12 bulan	2.339.200	



4	1	1	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			BINUANG	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	2.339.200	0	0	12 bulan	2.339.200
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						944.623.284				397.852.349
4	1	1	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			BINUANG	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	65.532.966	0	0	12 bulan	1.484.190
4	1	1	12	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor			BINUANG	Waktu Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	36.681.243	0	0	12 bulan	21.075.291
4	1	1	17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			BINUANG	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	91.571.506	0	0	12 bulan	66.483.776
4	1	1	18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			BINUANG	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	21.809.413	0	0	12 bulan	4.890.292
4	1	1	30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			BINUANG	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	729.028.156	0	0	12 bulan	303.918.800

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						922.241.734				390.255.180
4	1	1	32	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya			BINUANG	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	17 unit	476.013.806	0	0	unit	29.895.180
4	1	1	35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya			BINUANG	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	2 unit	446.227.928	0	0	unit	360.360.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						333.231.456				238.537.280
4	1	1	37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			BINUANG	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6.045.456	0	0	12 bulan	4.489.200
4	1	1	39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			BINUANG	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	50.777.040	0	0	12 bulan	44.781.840
4	1	2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			BINUANG	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	276.408.960	0	0	12 bulan	189.266.240

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						279.591.616				200.442.188
4	1	2	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan			BINUANG	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan	12 bulan	69.655.616	0	0	12 bulan	45.506.188
4	1	2	55	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			BINUANG	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 bulan	209.936.000	0	0	12 bulan	154.936.000
4	1	2	57	Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			BINUANG	Waktu Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	12 bulan	-0
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						36.226.000				36.400.000

				Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						36.226.000				36.400.000
4	1	2	63	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah Kecamatan			BINUANG	Waktu Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	12 bulan	36.226.000	0	0	12 bulan	36.400.000
				PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.242.219.632				2.641.490.800
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						216.471.642				310.045.050
4	1	2	66	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			BINUANG	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan	4.417.500	0	0	1 Kegiatan	4.511.500

				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			BINUANG	Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			0	0	1 Kegiatan	2.255.750
4	1	3		Peningkatan Efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan			BINUANG	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	1 kegiatan	212.054.142	0	0	1 kegiatan	303.277.800
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.025.747.990				2.317.910.350
4	1	3	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			BINUANG	Jumlah unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 unit	700.500.966	0	0	6 unit	841.743.100
4	1	3	6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			BINUANG	Waktu Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 bulan	1.325.247.024	0	0	12 bulan	1.473.911.500

				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			BINUANG	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-			1 Kegiatan	2.255.750
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			BINUANG							13.534.500
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			BINUANG	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-			4 Kegiatan	9.023.000
				Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			BINUANG	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-			2 Kegiatan	4.511.500
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										8.477.000
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										8.477.000
										130.458.434				8.477.000
														8.477.000

			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			BINUANG	Waktu kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 bulan	128.249.684	0	0	12 bulan	6.221.250
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			BINUANG	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan				1 Kegiatan	2.255.750
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						117.474.398				54.468.650
4	1	41	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						117.474.398				54.468.650

4	1	41	1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pelaksanaan bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan RI			BINUANG	Jumlah Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila ,pelaksanaan undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, pelaksanaan bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan RI	1 kegiatan	117.474.398	0	0	1 kegiatan	42.108.650
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0	0	6 Kegiatan	12.360.000



				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						37.590.194				18.246.700
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						37.590.194				18.246.700
4	1	41	3	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala desa			BINUANG	Jumlah Kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala desa	1 kegiatan	2.208.750	0	0	1 kegiatan	2.208.750
4	1	41	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			BINUANG	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 kegiatan	8.835.000	0	0	1 kegiatan	8.835.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa			BINUANG	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa	1 kegiatan	2.208.750	0	0	1 kegiatan	2.208.750

			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			BINUANG	Waktu Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 kegiatan	2.208.750	0	0	1 Kegiatan	2.208.750
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			BINUANG	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala desa	12 bulan	22.128.944	0	0	12 bulan	22.128.944
<b>TOTAL</b>									<b>8.480.605.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8.973.451.682</b>

### **1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, perlu adanya Standar Pelayanan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya dalam melaksanakan pelayanan publik, dituntut untuk menyusun Standar Pelayanan (SP) sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Binuang ada 15 jenis sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian;
- 2) Pelayanan Permintaan Data terkait Pemerintahan Kecamatan;
- 3) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris;
- 4) Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah;
- 5) Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Nikah;
- 6) Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- 7) Pelayanan Legalisasi Proposal Permohonan Bantuan;
- 8) Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 9) Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- 10) Pelayanan Legalisasi Surat Permohonan Izin Keramaian;
- 11) Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
- 12) Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Pemberian Bantuan pada Masyarakat;
- 13) Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pendaftaran TNI / POLRI);
- 14) Pelayanan Perekaman KTP Elektronik;
- 15) Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Tidak Pernah Dihukum.

Sedangkan untuk penilaian Kecamatan Binuang menggunakan Kuisisioner Penilaian atas Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat. Menggunakan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Minimal B dengan 9 kriteria sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian Persyaratan
- 2) Prosedur Pelayanan
- 3) Ketepatan Waktu
- 4) Kewajaran biaya
- 5) Hasil dari Pelayanan
- 6) Kemampuan petugas
- 7) Kesopanan dan keramahan petugas
- 8) Maklumat / Janji Pelayanan
- 9) Tindak Lanjut Pengajuan

## **BAB II**

### **CAPAIAN KINERJA SKPD**

#### **2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

##### **2.1.1 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

###### **1. Urusan Fungsi Penunjang**

Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin, pada BAB II pasal 2 point 1. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 2 Point 2, 1. Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Pemberian dukungan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan;
- b) Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c) Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan dibidang Perekonomian;
- e) Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan dibidang Pembangunan;

- f) Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan dibidang Kesejahteraan Rakyat;
- g) Pengelolaan kesektarian dan;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Indikator Kinerja Kunci**

Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran Kinerja, Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (Input), keluaran (output) dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan Komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, Target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah Kinerja kemudian dianalisis untuk diketahui ketidakberhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan Kinerja yang akan datang. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Binuang**  
**Tahun 2023**

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Penghitungan)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Berdasarkan Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>- <u>Cara Perhitungan :</u> Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan</li> </ul>	Camat	Sekcam, Semua Kasi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Agar Dapat Mengetahui Data Dan Informasi Hasil Dari Pengukuran Secara Kuantitatif Dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat. Skala Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat Minimal B (76,61 – 88,30 : B = Baik)</li> <li>- <u>Cara Perhitungan :</u> Jumlah Layanan Dengan IKM Minimal B / Jumlah Layanan Di Kecamatan X 100 %</li> </ul>	Camat	Sekcam, Semua Kasi
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Surat Rekomendasi Yang Dikeluarkan Oleh Kecamatan Yang Memenuhi Persyaratan Yang Telah Ditentukan</li> <li>- <u>Cara Perhitungan :</u> Jumlah Rekomendasi Yang Diselesaikan / Jumlah Rekomendasi Yang Masuk X 100 %</li> </ul>	Camat	Sekcam, Semua Kasi
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Pengaduan Yang Diselesaikan Baik Melalui Mediasi Atau Dengan Cara-Cara Lain</li> <li>- <u>Cara Perhitungan :</u> Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan / Jumlah Pengaduan Yang Masuk X 100 %</li> </ul>	Camat	Sekcam, Semua Kasi



3.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Sesuai Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Pengelolaan Keuangan Desa Yang Baik Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku</li> <li>- <u>Cara Perhitungan :</u> Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan / Jumlah Desa Se Kecamatan Binuang X 100 %</li> </ul>	Camat	Kasi Pemerintahan
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Pengelolaan Aset Desa Yang Baik Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku</li> <li>- <u>Cara Perhitungan :</u> Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa Sesuai Ketentuan / Jumlah Desa Se Kecamatan Binuang X 100 %</li> </ul>	Camat	Kasi Pemerintahan
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Data Kependudukan Terverifikasi Yang Diterima Dari Desa/Kelurahan</li> <li>- <u>Cara Perhitungan :</u> Jumlah Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik / Jumlah Desa Se Kecamatan Binuang X 100 %</li> </ul>	Camat	Kasi Pemerintahan
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Cara Perhitungan :</u> Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</li> </ul>	Camat	Sekcam
5.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Cara Perhitungan :</u> Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)</li> </ul>	Camat	Sekcam

### 3. Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023**

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Belanja Pegawai	93,82 %	Realisasi APBD Tahun 2023	
2	Pengadaan	Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	97,12 %	Realisasi APBD Tahun 2023	
3	Kepegawaian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar	100 %	Data Nominatif PNS Kecamatan Binuang tahun 2023	

### 4. Sumber Data

Data untuk penyusunan Laporan ini di ambil dari Renstra SKPD, Renja SKPD, Kuisisioner Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM , FMIS Keuangan SKPD, Data Daftar Nominatif ASN, Target Perjanjian Kinerja SKPD, Belanja Pegawai di Daftar Gaji dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 sebagai tambahan narasi.

## 2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Visi dan Misi Kecamatan Binuang yang termuat dalam RENSTRA Kecamatan 2018-2023, telaahan Visa dan Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang dalam membangun daerah mengacu pada visi Kepala Daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut : “ Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis” dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bersama : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
- Mewujudkan : Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
- Maju : Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
- Sejahtera : Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial.

Visi Kecamatan merupakan implementasi dari visi Kabupaten yaitu “  
Terwujudkan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat yang Mandiri dan  
Sejahtera “

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari Desa
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Misi Kecamatan Binuang yang merupakan Implementasi Misi dari Kabupaten Tapin yaitu Point 1 dan 5.

### **2.2.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

Target Kinerja Kecamatan Binuang Untuk Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3****Target Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam pelayanan	89 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Sesuai Ketentuan	100 %
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100 %
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,82 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	18,90 Poin

### 2.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja di Bandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja disajikan pada Tabel 2.4. Pada tabel dapat dilihat bahwa Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dicapai seluruhnya oleh Kecamatan Binuang.

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023 Dibandingkan**  
**dengan Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi / Capaian
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam pelayanan	89 Poin	89,03 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Sesuai Ketentuan	100 %	100 %
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100 %	100 %
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %	100 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,82 Score	72,65 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	18,90 Poin	18,90 Score

## 2.2.3 Pengukuran Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya (2022)

**Tabel 2.5**  
**Pengukuran Kinerja**

No.	Sasaran Strategis Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi / Capaian 2023	Target 2022	Realisasi / Capaian 2022
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam pelayanan	89 Poin	89,03 Poin	88 Poin	88,79 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,82 Score	72,65 Score	-	-
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	18,90 Poin	18,90 Score	-	-

## 2.2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah (Renstra) 2018-2023

**Tabel 2.6**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Pembangunan Jangka Menengah (Renstra) 2018-2023**

Sasaran 1		Meningkatnya Pelayanan Publik																		
No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Renstra Perubahan (2018-2023)	Target						Realisasi						Capaian %					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		85	85	86	87	88	89	80	84,02	86,06	87,5	88,76	89,03	94,11	98,84	100,06	100,57	100,86	100,34
2	Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	RATA-RATA		92.50	93,00	93,59	93.59	93.50	93.50	90,00	92,01	93,03	93,75	94,38	94,51	97,05	99,42	100,03	100,25	100,43	100,17



Sasaran 5		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa																			
No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Rentra Perubahan (2018-2023)	Target						Realisasi						Capaian %						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik		8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik		8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Sesuai Ketentuan (%)							100						100							100
2	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan (%)							100						100							100
3	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik (%)							100						100							100
	RATA-RATA								100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

### **2.2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil yang telah di Capai**

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Binuang adalah sebagai berikut :

Hasil kinerja yang telah dicapai tidak lepas dari sumber daya yang tersedia pada Kecamatan Binuang untuk kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok maupun keberhasilan dalam melaksanakan visi misi Kecamatan Binuang. Semua target indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja hampir semua memenuhi target, untuk target realisasi anggaran semuanya berjalan dengan sesuai target yaitu di atas 80% lebih. Walaupun masih ada keterbatasan seperti jumlah aparatur yang masih kurang dari yang seharusnya, juga untuk fasilitas penunjang kegiatan operasional masih kurang untuk peralatan kantor seperti Personal Komputer/PC dan Printer masih terbatas, kurangnya peralatan untuk peninjauan ke lapangan, walaupun demikian Kecamatan Binuang terus melayani masyarakat dengan sebaik mungkin.

Terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Binuang adalah sebagai berikut :

Program kegiatan 2023 sama dengan tahun sebelumnya (Tahun 2022) yaitu sebanyak 6 program kegiatan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

## 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel 2.7**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023**

No.	Uraian	2022	2023
1.	Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	3.349.471.779	3.214.427.369
2.	Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa	1.612.961.322	3.263.251.205
3.	Realisasi Belanja Modal	1.075.276.293	1.491.346.442
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.037.709.394</b>	<b>7.969.025.016</b>

Seperti yang terlihat di tabel di atas terjadi perubahan realisasi anggaran dari Rp 6.037.709.394,- tahun 2022 menjadi Rp. 7.969.025.016,- tahun 2023, dengan persentase realisasi tahun 2022 adalah 91,24 % dan pada tahun 2023 menjadi 93,97% atau adanya kenaikan sebesar 2,73%. Serapan anggaran yang tinggi ini juga diikuti dengan tinggi capaian kinerja Kecamatan Binuang.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program tersebut merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran startegis , Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut dari hasil temuan pemeriksaan, Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN, dan Meningkatnya Pelayanan Sekretariat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.517.603.510 atau sebesar 93,26 % dengan hasil capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Nilai Komponen AKIP yaitu a) Perencanaan Kinerja sebesar 22,60 Score  
b) Pengukuran Kinerja sebesar 22,50 c) Pelaporan Kinerja sebesar 10,05 Score dan d) Evaluasi Internal sebesar 15,50 Score
- 2) Persentase hasil temuan pemeriksaan yang di tindaklanjuti: 100% (Tercapai)
- 3) Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 %: 100% (Tercapai)
- 4) dan Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat: 71 Poin (Tercapai).

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan satu indikatornya yaitu Sasaran strategis yaitu Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di desa dengan hasil capaian indikator kinerja Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu : 100 % (Tercapai). Program ini dikelola oleh Seksi Pemerintahan dengan sasaran pelayanan kependudukan seperti perekaman e-KTP dan lain sebagainya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.225.900 atau sebesar 100 %

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan para Lurah realisasi anggaran sebesar Rp. 2.138.710.488 atau sebesar 95,38 % dengan sasaran startegis, Terakomodirnya usulan anggaran RKPDes/Kel dalam Desk Forum SKPD, Tersedianya rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat, Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan , Tersedianya Pelayanan Rekomendasi izin usaha dengan hasil capaian indikator kinerja Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD : 75 % (Tercapai), Persentase

rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan : 100 % (Tercapai), Persentase Terlaksananya Pembangunan di Kelurahan : 100 % (Tercapai), Persentase Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan : 100 % (Tercapai) dan Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan : 100 % (Tercapai).

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, yang bertanggungjawab pada program ini adalah Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada program tersebut dapat terealisasi anggaran sebesar Rp130.455.320,00 atau sebesar 100 %. Dengan sasaran strategis program yaitu Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat dan hasil capaian indikator kinerja Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani : 100 % (Tercapai).

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum juga di Kelola oleh seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dengan sasaran strategis program yaitu Terlaksananya fasilitasi pengaduan Masyarakat dan hasil capaian indikator kinerja Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani : 100 % (Tercapai). Adapun capaian realisasi anggaran pada program tersebut sebesar Rp 117.469.148 atau sebanyak 100 %

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, program ini di kelola oleh seksi Pemerintahan, dapat terealisasi dengan baik yaitu sebesar Rp 28.560.650 atau 75,98 %. Dengan sasaran strategis program yaitu Tersedianya Pelayanan Rekomendasi Pemerintahan, Terlaksananya pembinaan tentang dokumen pemerintahan desa,

Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa dan Terlaksananya pembinaan pengelolaan aset desa. Dengan hasil capaian indikator kinerja adalah Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan : 100% (Tercapai), Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi) : 100% (Tercapai), Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%: 100% (Tercapai), dan Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik : 100% (Tercapai).

Berdasarkan peta jabatan Peraturan Bupati Tapin No.25 Tahun 2016 selain Jabatan Struktural juga terdapat Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Untuk jabatan JFU berdasarkan peta jabatan minimal 19 orang dan JFT. minimal 2 orang, sedangkan jabatan yang terisi untuk JFU hanya terisi sebanyak 6 JFU sedangkan yang belum terisi sebanyak 13 JFU, untuk jabatan JFT belum ada terisi. Sama dengan anggaran SKPD, sumber daya manusia di Kecamatan Binuang juga akan dimaksimalkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan efektif dan efisien.

Jabatan – Jabatan JFU/JFT yang masih belum terisi yaitu :

1. Analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Pengadministrasi keuangan
3. Bendahara
4. Verifikator Keuangan
5. Pengadministrasian umum dan Kepegawaian
6. Pramu Kantor

7. Satuan Pengamanan
8. Pengadministrasi Pemerintahan
9. Pengadministrasi Pertanahan
10. Pengadministrasian Kependudukan
11. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
12. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian

Secara keseluruhan efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan se efisien mungkin, terjadinya kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya merupakan pengaruh kenaikan harga dimasyarakat dan inflasi secara global, dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas.

#### **2.2.6 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Tingkat penerapan kebijakan capaian kinerja di Kecamatan Binuang diukur menggunakan 9 indikator yaitu ; (1) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan, (2) Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B, (3) Persentase Rekomendasi yang diselesaikan, (4) Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan, (5) Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan, (6) Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset yang sesuai Ketentuan, (7) Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik, (8) Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dan (9) Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah.

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan, adalah sasaran strategis kinerja yang ingin di capai dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan adalah sasaran strategis kinerja yang ingin di capai dengan indikator kinerja yaitu Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B, Persentase Rekomendasi yang diselesaikan, dan Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan.

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa adalah sasaran startegis kinerja yang akan di capai dengan indikator kinerja yaitu Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan, Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset yang sesuai Ketentuan, dan Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sasaran startegis kinerja yang akan di capai dengan indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah adalah sasaran startegis kinerja yang ingin di capai dengan indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Binuang tahun 2023 adalah laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Binuang Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan sebagai sebuah wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta merupakan salah satu alat sarana untuk melakukan penilaian dan evaluasi yang berguna untuk perbaikan kinerja di Kecamatan Binuang pada masa yang akan datang.

#### **3.2 Saran-saran**

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan agar target dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023 dapat dicapai dan dilaksanakan.

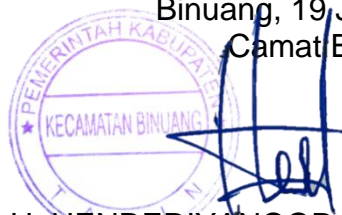
Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari adanya kekurangan, untuk itu perlu adanya koreksi yang membangun untuk penyempurnaan dalam pelaporan

yang lebih akuntabel dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Binuang ini dapat menjadi bahan bagi pemerintahan Kabupaten Tapin untuk memberikan catatan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pembangunan.

Binuang, 19 Januari 2024

Camat Binuang,



H. HENDERYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM  
NIP. 19860101 201101 1 015

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Lampiran I Daftar Prestasi Kecamatan Binuang Tahun 2023

No	Prestasi	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2023	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2	Lulusan Terbaik Kedua pada Pendidikan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI Tahun 2023 yg diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (atas nama: H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep,Ners, MM)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan
3	Finalis Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 atas Inovasi <b>SUPERMAN</b> (Sudut Permainan dan Edukasi Minat Anak)	Pj Bupati Tapin
3	Mampu Memenuhi Target Badan Hukum BUMDesa Pada Satu Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2022	Bupati Tapin
4	Juara III Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
5	Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang)	Bupati Tapin
6	Juara I Lomba Asman Toga Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Desa Padang Sari Kecamatan Binuang)	Bupati Tapin
7	Juara I Lomba Asman Toga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Desa Padang Sari Kecamatan Binuang)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
9	Juara I Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang)	Bupati Tapin
10	Juara I Lomba Masak Serba Ikan (Menu Balita) Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang)	Bupati Tapin

11	Juara III Lomba Masak B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) (Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang)	Bupati Tapin
12	Lomba Jambore Posyandu Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Juara 1 Lomba Penyuluhan</li> <li>➤ Juara 1 Penampilan Kontingen (Yel-Yel)</li> <li>➤ Juara 1 Lomba Penimbangan dan Pengisian KMS</li> <li>➤ Juara Kader terbaik berprestasi Kab.Tapin (a.n. Ibu Wiwit Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang)</li> </ul>	Ketua TP PKK Kabupaten Tapin
13	Juara III Lomba Hatinya PKK Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang)	Bupati Tapin
14	Juara I Lomba Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
15	Lomba Jambore PKK Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Juara Harapan 1 Lomba Administrasi PKK</li> <li>➤ Juara Harapan 2 Lomba Cerdas Cermat Ceria</li> <li>➤ Juara Harapan 3 Lomba Yel-Yel Pesan Berantai</li> <li>➤ Juara Harapan I Lomba Menghias Kue</li> </ul>	Ketua TP PKK Kabupaten Tapin



**panrb**

KEWANTUBAHAN  
PENGELOLAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# *Piagam Penghargaan*

Diberikan Kepada

**Kecamatan Binuang  
Pemerintah Kabupaten Tapin**

Sebagai

**Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  
Kategori "Sangat Baik"  
Tahun 2023**

Jakarta, 21 November 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi



H. Abdullah Azwar Anas, M.Si



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN**  
**PIAGAM PENGHARGAAN**

Diberikan Kepada :  
**KECAMATAN BINUANG**

Atas Inovasi :  
**SUPERMAN (Sudut Permainan Dan Edukasi Minat Anak)**

Sebagai :  
**FINALIS**  
**LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023**

Rantau, 21 November 2023

Pj. Bupati Tapin

Muhammad Syarifuddin, M.Pd

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**



# PIAGAM PENGHARGAAN



Dengan bangga mempersembahkan kepada

## KECAMATAN BINUANG

Atas Prestasinya Yang Mampu Memenuhi Target  
Badan Hukum BUMDesa Pada Satu Kecamatan  
Di-Kabupaten Tapin Tahun 2022

BUPATI TAPIN  
Rantau, 16 Maret 2023



**H.M. ARIFIN ARPAN**





KAB. TAPIN

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

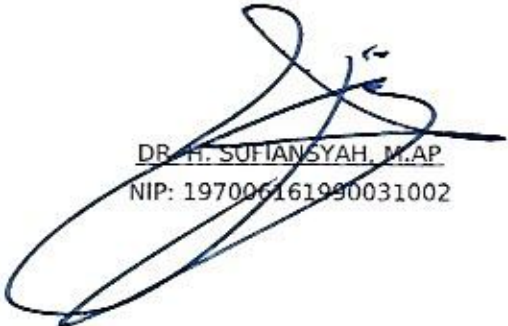
- a. Nama : H.HENDERYANOOR EFENDI,S.Kep,Ners,MM
- b. NIP : 198601012011011015
- c. Jabatan : Camat Binuang

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Tapin sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

  
DR. H. SUFIANSYAH, M.AP  
NIP: 197006161990031002

Rantau, tanggal 06 Oktober 2023

Disahkan oleh,  
PPKD

  
HARIS FADHILAH, SE, MM  
NIP: 197408262005011005



KAB. TAPIN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN  
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Pengguna Anggaran :

a. Nama : H.HENDERYANOOR EFENDI,S.Kep,Ners,MM  
b. NIP : 198601012011011015  
c. Jabatan : Camat Binuang

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,  
PPKD

HARIS FADILLAH, SE, MM  
NIP: 197406262005011005



Binuang, tanggal 06 Oktober 2023  
Pengguna Anggaran  
H.HENDERYANOOR EFENDI,S.Kep.Ners,MM  
NIP. 198601012011011015

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Tapin  
Tahun Anggaran 2023

**DPPA  
REKAPITULASI  
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>		
5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp5.847.085.005</b>	<b>Rp6.945.075.037</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp3.426.141.515	Rp3.426.142.329
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.420.943.490	Rp3.518.932.708
5 2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp1.447.055.180</b>	<b>Rp1.535.530.440</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp33.395.180	Rp508.169.474
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp535.260.000	Rp482.960.000
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp878.400.000	Rp544.400.966
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp7.294.140.185</b>	<b>Rp8.480.605.477</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(Rp7.294.140.185)</b>	<b>(Rp8.480.605.477)</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp367.037.774
Februari	Rp0	Februari	Rp2.098.078.000
Maret	Rp0	Maret	Rp354.251.528
April	Rp0	April	Rp619.294.296
Mei	Rp0	Mei	Rp1.232.413.618
Juni	Rp0	Juni	Rp416.464.260
Juli	Rp0	Juli	Rp315.655.848
Agustus	Rp0	Agustus	Rp302.292.638
September	Rp0	September	Rp296.716.359
Oktober	Rp0	Oktober	Rp2.368.134.916
November	Rp0	November	Rp55.160.000
Desember	Rp0	Desember	Rp55.106.240
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp8.480.605.477

Mengesahkan,  
PPKD

H. H. FADHILAH, SE. MM  
NIP: 197406262005011005

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	DR. H. SUFIANSYAH, M.AP	197006161990031002	Ketua	
2.	HARIS FADHILAH, SE, M.M	197406262005011005	Wakil Ketua I	
3.	Dr. H. MEIDY HARIS PRAYOGA, SE. ME	198405222008031001	Wakil Ketua II	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	H. ZAINAL ABIDIN, S.Sos	196811081990101002	Anggota	
5.	H. ERRANI MARTIN, SKM.,MM	196403141988021002	Anggota	
6.	FIQRI IRMAWAN, S.STP	197704091995111001	Anggota	
7.	UNDA ABSORI, SH, MH	197007222005011013	Anggota	
8.	GL. RIDHA JAYA W., S.Sos	196810091990101001	Anggota	
9.	DR. H. ZAINAL AQLI, ST, MT	196902141994031011	Anggota	
10.	RIZKAN NOOR, S.T	198210262009041004	Anggota	
11.	RINI YUSNITA, STP, MM	197902061997112001	Anggota	
12.	DR. PADLIANOR, S.Sos, M.AP	197608171995031001	Anggota	
13.	ACHMAD RAMADHAN, S.H	198605172011011014	Anggota	
14.	KHAIRUL, S.AK	197511142005011007	Anggota	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kab. Tapin  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2023**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Benuang

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Klasifikasi Belanja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01				<b>KECAMATAN</b>				4.988.361.742	390.255.180	0	0	5.378.616.922	6.086.142.903	835.029.474	0	0	6.921.172.377	1.542.555.455	
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				4.273.779.732	390.255.180	0	0	4.664.034.912	5.081.607.345	835.029.474	0	0	5.916.636.819	1.252.601.907	
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				6.008.000	0	0	0	6.008.000	6.008.000	0	0	0	6.008.000	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		6.008.000	0	0	0	6.008.000	6.008.000	0	0	0	6.008.000	0	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				3.430.939.915	0	0	0	3.430.939.915	3.430.940.729	0	0	0	3.430.940.729	814	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		3.426.141.515	0	0	0	3.426.141.515	3.426.142.329	0	0	0	3.426.142.329	814	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		2.399.200	0	0	0	2.399.200	2.399.200	0	0	0	2.399.200	0	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		2.399.200	0	0	0	2.399.200	2.399.200	0	0	0	2.399.200	0	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				397.852.349	0	0	0	397.852.349	944.623.284	0	0	0	944.623.284	546.770.935	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan		1.484.190	0	0	0	1.484.190	65.532.966	0	0	0	65.532.966	64.048.776	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.075.291	0	0	0	21.075.291	36.681.243	0	0	0	36.681.243	15.605.952	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66.483.776	0	0	0	66.483.776	91.571.506	0	0	0	91.571.506	25.087.730	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
1	2	3	4	5				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.890.292	0	0	0	4.890.292	21.809.413	0	0	0	21.809.413	16.919.121	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			303.918.809	0	0	0	303.918.809	729.028.156	0	0	0	729.028.156	425.109.356	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				0	390.255.180	0	0	390.255.180	87.212.260	835.029.474	0	0	922.241.734	531.986.554	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	29.895.180	0	0	29.895.180	14.031.320	461.982.486	0	0	476.013.806	446.118.626	
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	360.360.000	0	0	360.360.000	73.180.940	373.046.988	0	0	446.227.928	85.867.928	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				238.537.280	0	0	0	238.537.280	333.231.456	0	0	0	333.231.456	94.694.176	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.489.200	0	0	0	4.489.200	6.045.456	0	0	0	6.045.456	1.556.256	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44.781.840	0	0	0	44.781.840	50.777.040	0	0	0	50.777.040	5.995.200	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			189.266.240	0	0	0	189.266.240	276.408.960	0	0	0	276.408.960	87.142.720	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				200.442.188	0	0	0	200.442.188	279.591.616	0	0	0	279.591.616	79.149.428	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45.506.188	0	0	0	45.506.188	69.655.616	0	0	0	69.655.616	24.149.428	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			154.936.000	0	0	0	154.936.000	209.936.000	0	0	0	209.936.000	55.000.000	
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				36.226.000	0	0	0	36.226.000	36.226.000	0	0	0	36.226.000	0	
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>				36.226.000	0	0	0	36.226.000	36.226.000	0	0	0	36.226.000	0	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36.226.000	0	0	0	36.226.000	36.226.000	0	0	0	36.226.000	0	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				613.282.826	0	0	0	613.282.826	682.786.532	0	0	0	682.786.532	69.503.706	
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				146.967.936	0	0	0	146.967.936	216.471.642	0	0	0	216.471.642	69.503.706	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.417.500	0	0	0	4.417.500	4.417.500	0	0	0	4.417.500	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T+1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang	Program	Kejelasan	Sub-Kejelasan					T (Sebelum)					T (Setelah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-9)	21
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			142.550.436	0	0	0	142.550.436	212.054.142	0	0	0	212.054.142	69.503.706	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>				<b>466.314.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.314.890</b>	<b>466.314.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.314.890</b>	<b>0</b>	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			466.314.890	0	0	0	466.314.890	466.314.890	0	0	0	466.314.890	0	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>4.417.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.417.500</b>	<b>130.458.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.458.434</b>	<b>126.040.934</b>	
7	01	04	7.03		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>4.417.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.417.500</b>	<b>130.458.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.458.434</b>	<b>126.040.934</b>	
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.208.750	0	0	0	2.208.750	128.249.684	0	0	0	128.249.684	126.040.934	
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.208.750	0	0	0	2.208.750	2.208.750	0	0	0	2.208.750	0	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>23.065.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.065.490</b>	<b>117.474.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.474.398</b>	<b>94.408.908</b>	
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				<b>23.065.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.065.490</b>	<b>117.474.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.474.398</b>	<b>94.408.908</b>	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23.065.490	0	0	0	23.065.490	117.474.398	0	0	0	117.474.398	94.408.908	
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>37.590.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.590.194</b>	<b>37.590.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.590.194</b>	<b>0</b>	
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>37.590.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.590.194</b>	<b>37.590.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.590.194</b>	<b>0</b>	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.208.750	0	0	0	2.208.750	2.208.750	0	0	0	2.208.750	0	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.835.000	0	0	0	8.835.000	8.835.000	0	0	0	8.835.000	0	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.208.750	0	0	0	2.208.750	2.208.750	0	0	0	2.208.750	0	
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.208.750	0	0	0	2.208.750	2.208.750	0	0	0	2.208.750	0	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.128.944	0	0	0	22.128.944	22.128.944	0	0	0	22.128.944	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp367.037.774
Februari	Rp1.431.425.950
Maret	Rp354.251.528
April	Rp619.294.296
Mei	Rp626.671.368
Juni	Rp416.464.260
Juli	Rp285.655.848
Agustus	Rp302.292.638
September	Rp296.716.359
Oktober	Rp2.111.096.116
November	Rp55.160.000
Desember	Rp55.106.240
Jumlah	Rp6.921.172.377




Rantau, tanggal 06 Oktober 2023  
 Camat Binuang

H. HENDERITANOOR EFENDI, S.Kep.Ners, MM  
 NIP: 198601012011011015



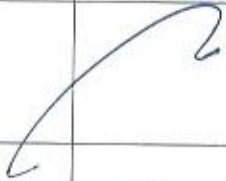
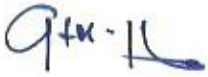



Mengesahkan,  
 PPKD


  
 HARIS FADILAH, SE, MM  
 NIP: 197406262005011005

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	DR. H. SUFIANSYAH, M.AP	197006161990031002	Ketua	
2.	HARIS FADILAH, SE, M.M	197406262005011005	Wakil Ketua I	
3.	Dr. H. MEIDY HARIS PRAYOGA, SE. ME	198405222008031001	Wakil Ketua II	
4.	H. ZAINAL ABIDIN, S.Sos	196811081990101002	Anggota	



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	H. ERRANI MARTIN, SKM.,MM	196403141988021002	Anggota	
6.	FIQRI IRMAWAN, S.STP	197704091995111001	Anggota	
7.	UNDA ABSORI, SH, MH	197007222005011013	Anggota	
8.	Gt. RIDHA JAYA W., S.Sos	196810091990101001	Anggota	
9.	DR. H. ZAINAL AQLI, ST, MT	196902141994031011	Anggota	
10.	RIZKAN NOOR, S.T	198210262009041004	Anggota	
11.	RINI YUSNITA, STP, MM	197902061997112001	Anggota	
12.	DR. PADLIANOR, S.Sos, M.AP	197608171995031001	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
13.	ACHMAD RAMADHAN, S.H	198605172011011014	Anggota	
14.	KHAIRUL, S.AK	197511142005011007	Anggota	



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Binuang  
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.001 Kecamatan Binuang

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	<b>BELANJA</b>	8.480.605.477,00	7.969.025.016,00	93,97	6.037.709.394,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.945.075.037,00	6.477.678.574,00	93,27	4.962.433.101,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.426.142.329,00	3.214.427.369,00	93,82	3.349.471.779,00
5.1.02	Belanja Barang	3.518.932.708,00	3.263.251.205,00	92,73	1.612.961.322,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.535.530.440,00	1.491.346.442,00	97,12	1.075.276.293,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	508.169.474,00	486.880.692,00	95,81	130.634.900,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	482.960.000,00	465.418.000,00	96,37	195.615.000,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	544.400.966,00	539.047.750,00	99,02	749.026.393,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(8.480.605.477,00)	(7.969.025.016,00)	0	(6.037.709.394,00)
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(8.480.605.477,00)</b>	<b>(7.969.025.016,00)</b>	<b>0</b>	<b>(6.037.709.394,00)</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Tahun Anggaran 2023  
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Binuang  
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.001 Kecamatan Binuang

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	8.480.605.477,00	0,00	7.969.025.016,00	7.969.025.016,00	(511.580.461,00)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.945.075.037,00	0,00	6.477.678.574,00	6.477.678.574,00	(467.396.463,00)
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	3.426.142.329,00	0,00	3.214.427.369,00	3.214.427.369,00	(211.714.960,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.783.642.329,00	0,00	1.663.193.925,00	1.663.193.925,00	(120.448.404,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.367.591.680,00	0,00	1.295.427.800,00	1.295.427.800,00	(72.163.880,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.367.591.680,00	0,00	1.295.427.800,00	1.295.427.800,00	(72.163.880,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	134.012.773,00	0,00	117.500.096,00	117.500.096,00	(16.512.677,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	134.012.773,00	0,00	117.500.096,00	117.500.096,00	(16.512.677,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	166.020.000,00	0,00	152.110.000,00	152.110.000,00	(13.910.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	166.020.000,00	0,00	152.110.000,00	152.110.000,00	(13.910.000,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.760.000,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.760.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.260.000,00	0,00	20.245.000,00	20.245.000,00	(5.015.000,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.260.000,00	0,00	20.245.000,00	20.245.000,00	(5.015.000,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	83.382.570,00	0,00	75.389.220,00	75.389.220,00	(7.993.350,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	83.382.570,00	0,00	75.389.220,00	75.389.220,00	(7.993.350,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.614.273,00	0,00	2.504.141,00	2.504.141,00	(1.110.132,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.614.273,00	0,00	2.504.141,00	2.504.141,00	(1.110.132,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.001.033,00	0,00	17.668,00	17.668,00	(983.365,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.001.033,00	0,00	17.668,00	17.668,00	(983.365,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.642.500.000,00	0,00	1.551.233.444,00	1.551.233.444,00	(91.266.556,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	698.524.840,00	0,00	659.654.133,00	659.654.133,00	(38.870.707,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	698.524.840,00	0,00	659.654.133,00	659.654.133,00	(38.870.707,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	107.041.000,00	0,00	97.173.371,00	97.173.371,00	(9.867.629,00)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	107.041.000,00	0,00	97.173.371,00	97.173.371,00	(9.867.629,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	836.934.160,00	0,00	794.405.940,00	794.405.940,00	(42.528.220,00)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	836.934.160,00	0,00	794.405.940,00	794.405.940,00	(42.528.220,00)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.518.932.708,00	0,00	3.263.251.205,00	3.263.251.205,00	(255.681.503,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.517.967.708,00	0,00	1.367.988.782,00	1.367.988.782,00	(149.978.926,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.517.967.708,00	0,00	1.367.988.782,00	1.367.988.782,00	(149.978.926,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	62.164.504,00	0,00	7.622.080,00	7.622.080,00	(54.542.424,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	57.937.961,00	0,00	57.914.444,00	57.914.444,00	(23.517,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.269.906,00	0,00	15.259.450,00	15.259.450,00	(10.456,00)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.517.655,00	0,00	9.516.608,00	9.516.608,00	(1.047,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.991.596,00	0,00	21.814.053,00	21.814.053,00	(177.543,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.844.257,00	0,00	15.840.237,00	15.840.237,00	(4.020,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	48.234.271,00	0,00	48.125.554,00	48.125.554,00	(108.717,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.045.456,00	0,00	6.040.000,00	6.040.000,00	(5.456,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.663.628,00	0,00	2.663.628,00	2.663.628,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.837.802,00	0,00	50.203.000,00	50.203.000,00	(634.802,00)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	129.419.770,00	0,00	129.419.770,00	129.419.770,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.369.110,00	0,00	6.357.900,00	6.357.900,00	(11.210,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.588.288,00	0,00	6.588.288,00	6.588.288,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	511.474.750,00	0,00	455.090.350,00	455.090.350,00	(56.384.400,00)
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	330.000.000,00	0,00	302.100.000,00	302.100.000,00	(27.900.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	109.647.000,00	0,00	105.109.500,00	105.109.500,00	(4.537.500,00)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.507.560,00	0,00	4.507.560,00	4.507.560,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	6.353.040,00	0,00	6.353.040,00	6.353.040,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	56.666.154,00	0,00	51.028.320,00	51.028.320,00	(5.637.834,00)
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	66.435.000,00	0,00	66.435.000,00	66.435.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.151.747.000,00	0,00	1.114.421.550,00	1.114.421.550,00	(37.325.450,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.142.119.800,00	0,00	1.105.571.950,00	1.105.571.950,00	(36.547.850,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.000.000,00)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	50.961.000,00	0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	(18.361.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	194.400.000,00	0,00	194.400.000,00	194.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	426.000.000,00	0,00	426.000.000,00	426.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	184.000.000,00	0,00	184.000.000,00	184.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	26.000.000,00	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	(8.200.000,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	2.958.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	36.256.000,00	0,00	36.256.000,00	36.256.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.644.800,00	0,00	14.637.850,00	14.637.850,00	(6.950,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	2.200.000,00	0,00	1.220.100,00	1.220.100,00	(979.900,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.527.200,00	0,00	1.749.600,00	1.749.600,00	(777.600,00)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.123.200,00	0,00	777.599,00	777.599,00	(345.601,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.404.000,00	0,00	972.001,00	972.001,00	(431.999,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	209.936.000,00	0,00	154.450.000,00	154.450.000,00	(55.486.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	(54.000.000,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(54.000.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	152.736.000,00	0,00	151.250.000,00	151.250.000,00	(1.486.000,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	152.736.000,00	0,00	151.250.000,00	151.250.000,00	(1.486.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	627.232.000,00	0,00	614.340.873,00	614.340.873,00	(12.891.127,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	627.232.000,00	0,00	614.340.873,00	614.340.873,00	(12.891.127,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	554.932.000,00	0,00	542.040.873,00	542.040.873,00	(12.891.127,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72.300.000,00	0,00	72.300.000,00	72.300.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.050.000,00	0,00	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.050.000,00	0,00	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	12.050.000,00	0,00	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.535.530.440,00	0,00	1.491.346.442,00	1.491.346.442,00	(44.183.998,00)
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	508.169.474,00	0,00	486.880.692,00	486.880.692,00	(21.288.782,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	286.170.332,00	0,00	271.421.488,00	271.421.488,00	(14.748.844,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	104.690.844,00	0,00	96.925.000,00	96.925.000,00	(7.765.844,00)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.740.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.740.000,00)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	96.950.844,00	0,00	96.925.000,00	96.925.000,00	(25.844,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	171.721.988,00	0,00	164.738.988,00	164.738.988,00	(6.983.000,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	77.658.000,00	0,00	74.175.000,00	74.175.000,00	(3.483.000,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	92.600.000,00	0,00	89.100.000,00	89.100.000,00	(3.500.000,00)
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.463.988,00	0,00	1.463.988,00	1.463.988,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.757.500,00	0,00	9.757.500,00	9.757.500,00	0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.257.500,00	0,00	2.257.500,00	2.257.500,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	215.725.938,00	0,00	209.186.000,00	209.186.000,00	(6.539.938,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	215.725.938,00	0,00	209.186.000,00	209.186.000,00	(6.539.938,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	52.849.800,00	0,00	52.805.000,00	52.805.000,00	(44.800,00)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	162.876.138,00	0,00	156.381.000,00	156.381.000,00	(6.495.138,00)
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	6.273.204,00	0,00	6.273.204,00	6.273.204,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	6.273.204,00	0,00	6.273.204,00	6.273.204,00	0,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	6.273.204,00	0,00	6.273.204,00	6.273.204,00	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	482.960.000,00	0,00	465.418.000,00	465.418.000,00	(17.542.000,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	482.960.000,00	0,00	465.418.000,00	465.418.000,00	(17.542.000,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	482.960.000,00	0,00	465.418.000,00	465.418.000,00	(17.542.000,00)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	482.960.000,00	0,00	465.418.000,00	465.418.000,00	(17.542.000,00)
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	544.400.966,00	0,00	539.047.750,00	539.047.750,00	(5.353.216,00)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	544.400.966,00	0,00	539.047.750,00	539.047.750,00	(5.353.216,00)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	450.400.966,00	0,00	445.139.750,00	445.139.750,00	(5.261.216,00)
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	450.400.966,00	0,00	445.139.750,00	445.139.750,00	(5.261.216,00)
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	94.000.000,00	0,00	93.908.000,00	93.908.000,00	(92.000,00)
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	94.000.000,00	0,00	93.908.000,00	93.908.000,00	(92.000,00)
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(8.480.605.477,00)	0,00	(7.969.025.016,00)	(7.969.025.016,00)	511.580.461,00
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(8.480.605.477,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.969.025.016,00)</b>	<b>(7.969.025.016,00)</b>	<b>511.580.461,00</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN**

per 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Binuang

Sub Unit : Kecamatan Binuang

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
<b>0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.008.000,00	0,00	6.008.000,00	0,00	6.008.000,00	100,00	0,00
	<b>TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>6.008.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.426.142.329,00	3.214.427.369,00	0,00	0,00	3.214.427.369,00	93,82	211.714.960,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.399.200,00	0,00	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00	100,00	100,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.399.200,00	0,00	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00	100,00	100,00
	<b>TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>3.430.940.729,00</b>	<b>3.214.427.369,00</b>	<b>4.798.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219.225.569,00</b>	<b>93,83</b>	<b>211.715.160,00</b>
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.532.966,00	0,00	65.203.000,00	0,00	65.203.000,00	99,50	329.966,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.681.243,00	0,00	36.499.680,00	0,00	36.499.680,00	99,51	181.563,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.571.506,00	0,00	87.014.840,00	0,00	87.014.840,00	95,02	4.556.666,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.809.413,00	0,00	21.709.254,00	0,00	21.709.254,00	99,54	100.159,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	729.028.156,00	0,00	716.122.873,00	0,00	716.122.873,00	98,23	12.905.283,00
	<b>TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>944.623.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.549.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.549.647,00</b>	<b>98,09</b>	<b>18.073.637,00</b>
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	476.013.806,00	0,00	14.004.000,00	455.416.704,00	469.420.704,00	98,61	6.593.102,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	446.227.928,00	0,00	0,00	340.856.988,00	340.856.988,00	76,39	105.370.940,00





KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	922.241.734,00	0,00	14.004.000,00	796.273.692,00	810.277.692,00	87,86	111.964.042,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.045.456,00	0,00	6.040.000,00	0,00	6.040.000,00	99,91	5.456,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.777.040,00	0,00	50.770.090,00	0,00	50.770.090,00	99,99	6.950,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.408.960,00	0,00	275.631.360,00	0,00	275.631.360,00	99,72	777.600,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	333.231.456,00	0,00	332.441.450,00	0,00	332.441.450,00	99,76	790.006,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.655.616,00	0,00	68.851.152,00	0,00	68.851.152,00	98,85	804.464,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.936.000,00	0,00	154.250.000,00	0,00	154.250.000,00	73,47	55.686.000,00
	<b>TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.916.636.819,00</b>	<b>3.214.427.369,00</b>	<b>1.506.902.449,00</b>	<b>796.273.692,00</b>	<b>5.517.603.510,00</b>	<b>93,26</b>	<b>399.033.309,00</b>
<b>7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 2.2.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	279.591.616,00	0,00	223.101.152,00	0,00	223.101.152,00	79,80	56.490.464,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.226.000,00	0,00	36.225.900,00	0,00	36.225.900,00	100,00	100,00
	<b>TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>36.226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.225.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.225.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.01</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	36.226.000,00	0,00	36.225.900,00	0,00	36.225.900,00	100,00	100,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.417.500,00	0,00	4.417.300,00	0,00	4.417.300,00	100,00	200,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	212.054.142,00	0,00	212.022.548,00	0,00	212.022.548,00	99,99	31.594,00
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	216.471.642,00	0,00	216.439.848,00	0,00	216.439.848,00	99,99	31.794,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							



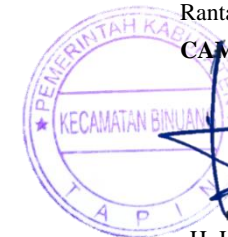
KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	466.314.890,00	0,00	466.314.890,00	0,00	466.314.890,00	100,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>682.786.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.754.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.754.738,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31.794,00</b>
<b>7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 4.7.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							
	TOTAL KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	466.314.890,00	0,00	466.314.890,00	0,00	466.314.890,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 4.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 4.7.03.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	128.249.684,00	0,00	128.246.670,00	0,00	128.246.670,00	100,00	3.014,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 4.7.03.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.208.750,00	0,00	2.208.650,00	0,00	2.208.650,00	100,00	100,00
	<b>TOTAL PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>130.458.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.455.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.455.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.114,00</b>
<b>7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 5.2.01</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	130.458.434,00	0,00	130.455.320,00	0,00	130.455.320,00	100,00	3.114,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	117.474.398,00	0,00	117.469.148,00	0,00	117.469.148,00	100,00	5.250,00
	<b>TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>117.474.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.469.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.469.148,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	117.474.398,00	0,00	117.469.148,00	0,00	117.469.148,00	100,00	5.250,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.208.750,00	0,00	2.208.750,00	0,00	2.208.750,00	100,00	0,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.835.000,00	0,00	8.832.050,00	0,00	8.832.050,00	99,97	2.950,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.208.750,00	0,00	2.205.900,00	0,00	2.205.900,00	99,87	2.850,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.208.750,00	0,00	2.208.750,00	0,00	2.208.750,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.128.944,00	0,00	13.105.200,00	0,00	13.105.200,00	59,22	9.023.744,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.921.172.377,00</b>	<b>3.214.427.369,00</b>	<b>2.502.368.205,00</b>	<b>796.273.692,00</b>	<b>6.513.069.266,00</b>	<b>94,10</b>	<b>408.103.111,00</b>

Rantau, 17 Januari 2024

**CAMAT BINUANG**



H. HENDERIANOOR EFENDI, S.Kep.Ners, MM.  
NIP198601012011011015





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN**

per 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Binuang

Sub Unit : Kelurahan Binuang

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.1 . 3.2.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.1 . 3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.1 . 3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	222.000.966,00	0,00	0,00	221.706.000,00	221.706.000,00	99,87	294.966,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.1 . 3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	317.029.834,00	0,00	285.151.500,00	0,00	285.151.500,00	89,94	31.878.334,00
<b>Jumlah</b>		<b><u>539.030.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>285.151.500,00</u></b>	<b><u>221.706.000,00</u></b>	<b><u>506.857.500,00</u></b>	<b><u>94,03</u></b>	<b><u>32.173.300,00</u></b>

Rantau, 17 Januari 2024



**LURAH**  
Hj. UMIE AMELEA ARTHA, SKM, MM  
NIP197108081992033007





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN**

per 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Binuang

Sub Unit : Kelurahan Karang Putih

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.3 . 3.2.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.3 . 3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.3 . 3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	226.000.000,00	0,00	0,00	225.833.000,00	225.833.000,00	99,93	167.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.3 . 3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	267.242.250,00	0,00	251.675.500,00	0,00	251.675.500,00	94,18	15.566.750,00
<b>Jumlah</b>		<b><u>493.242.250,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>251.675.500,00</u></b>	<b><u>225.833.000,00</u></b>	<b><u>477.508.500,00</u></b>	<b><u>96,81</u></b>	<b><u>15.733.750,00</u></b>

Rantau, 17 Januari 2024

Plt. Lurah Karang Putih



DUANA, A.Ma.Pd

NIP196512111986081002





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN

per 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Binuang

Sub Unit : Kelurahan Raya Belanti

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.2 . 3.2.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.2 . 3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.2 . 3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	252.500.000,00	0,00	0,00	247.533.750,00	247.533.750,00	98,03	4.966.250,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.2 . 3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	274.660.050,00	0,00	224.056.000,00	0,00	224.056.000,00	81,58	50.604.050,00
	<b>Jumlah</b>	<b>527.160.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.056.000,00</b>	<b>247.533.750,00</b>	<b>471.589.750,00</b>	<b>89,46</b>	<b>55.570.300,00</b>

Rantau, 17 Januari 2024

Lurah Raya Belanti



JAIDI, A.Md.Kes

NIP196610151988121002

